

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 7 | Vol. 1 | Februari 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Menolak Radikalisme dalam Pendidikan, Mencipta Sekolah Inklusif-Kebinekaan

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Pernyataan Masalah

Policy Brief ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan regulasi beserta implementasinya terkait pembinaan kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler (OSIS) di tingkat pusat, daerah dan sekolah. Kajian ini juga berupaya menemukan kebijakan alternatif yang memungkinkan sekolah untuk mempromosikan toleransi, kebinekaan, inklusivisme dan menolak radikalisme. Dari sini diharapkan para pihak terkait dapat merumuskan kebijakan serta mendorong implementasinya secara lebih tepat berdasarkan hasil dan rekomendasi penelitian ini.

Latar Belakang

Sejak bergulirnya iklim kebebasan dan reformasi pasca demokrasi, dalam dua dasawarsa terakhir ini penyebaran pemikiran keagamaan eksklusif dan radikal mulai gencar memasuki lembaga pendidikan formal baik sekolah maupun perguruan tinggi.¹ Sekolah swasta, utamanya yang bernaung di bawah lembaga keagamaan semisal NU dan Muhammadiyah, juga tidak luput menjadi sasaran infiltrasi kelompok radikal karena lemahnya pemahaman kebangsaan serta keagamaan yang inklusif dari lembaga pendidikan formal ini.²

Fenomena tersebut menjalar ke sekolah negeri seiring berjalannya waktu. Keterbatasan pengetahuan keagamaan yang didapatkan siswa di sekolah, ditambah hasrat ingin tahu yang besar, dimanfaatkan sebagai peluang oleh jaringan radikalisme untuk menginfiltrasi siswa dengan pengetahuan agama yang bernuansa kekerasan dan radikal. Melalui aktivitas yang dikembangkan OSIS, para aktivis dan mentor keagamaan yang berafiliasi pada organisasi radikal menyemaikan pemikiran agama yang bercorak intoleran, eksklusif dan anti kebangsaan. Walhasil, sekolah negeri pun

telah menjadi ladang penyemaian benih paham keagamaan intoleran dan radikal.³

Kenyataan ini semakin memprihatinkan karena guru, utamanya guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan belum memaksimalkan perannya untuk memantapkan ideologi kebangsaan serta menyebarkan paham keagamaan yang inklusif dan toleran, yang semestinya terjadi dalam proses pembelajaran di kelas.⁴ Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa minimnya pengetahuan para pengajar dan pimpinan sekolah tentang peta gerakan kelompok intoleran dan radikal, menimbulkan pandangan dan sikap membiarkan dari pimpinan sekolah terhadap berbagai aktivitas jaringan gerakan radikal di sekolah. Kondisi ini akhirnya menjadikan OSIS sebagai salah satu wadah kegiatan ekstrakurikuler, menjadi jalur infiltrasi ideologi radikal dan pemahaman keagamaan yang beorientasi kekerasan di sekolah.⁵

Semua proses ini pada gilirannya menjadi faktor signifikan bagi melemahnya mekanisme ketahanan sekolah melawan penyebaran ideologi radikal. Jika tidak diambil langkah kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengarahkan kegiatan siswa di sekolah melalui OSIS, bukan tidak mungkin kegiatan pendidikan dan kebudayaan di sekolah akan turut memperlemah visi dan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk di kalangan siswa. Padahal semestinya keberadaan OSIS mampu mendorong pembangunan karakter siswa yang berorientasi pada persatuan, kemajuan dan merayakan kemajemukan.

Signifikansi

Arti penting kajian ini terletak pada upaya menemukan fakta-fakta empiris tentang mekanisme masuknya ideologi dan pemikiran

1 Studi tentang infiltrasi gerakan radikal di sekolah dan perguruan tinggi misalnya disinggung dalam *Ilusi Negara Islam: Ilusi Gerakan Transnasional di Indonesia*, The Wahid Institute, Jakarta, 2009.

2 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 149/Kep/I.0/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah misalnya, menjadi respons infiltrasi yang masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah.

3 Studi MAARIF Institute tentang infiltrasi gerakan radikalisme di SMU Negeri misalnya ditulis oleh Ahmad Gaus AF, "Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah", *Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013, h. 174-191.

4 Salah satu yang membahas hal ini misalnya tulisan Muhd. Abdullah Darraz, "Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan", *Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8, No. 1, Juli, 2013, h. 154-173.

5 Ringkasan Eksekutif Penelitian "Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan, MAARIF Institute, 2017.

keagamaan intoleran, eksklusif dan radikal⁶ di sekolah. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, sistematis dan implementatif untuk menangkal ideologi kekerasan. Secara khusus kajian ini penting dalam rangka merevitalisasi kebijakan pembinaan kesiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler (OSIS) dan memperkuat peran sekolah dalam mendeteksi secara dini berkembangnya jaringan dan organisasi radikal melalui kegiatan keagamaan. Dengan begitu, diharapkan rekomendasi ini dapat mendorong munculnya inisiatif dan strategi dari pemangku kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang toleran dan inklusif di sekolah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai proses pengumpulan data, dengan cara melakukan wawancara mendalam semi terstruktur. Penelitian berlangsung di enam kota dari lima provinsi di Indonesia, yakni Kota Padang (Sumatera Barat), Kab. Cirebon (Jawa Barat), Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara).

Dari kota-kota tersebut dipilih 40 SMA/MA sebagai sampel penelitian (*purposive sampling*). Pemilihan sekolah didasarkan kepada kategori perkotaan-pedesaan, unggulan-non unggulan, dan homogen-heterogen.

Selama 20 hari pada 2-21 Oktober 2017, sebanyak 440 orang informan diwawancarai yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakasek Bidang Kesiswaan, Guru Pembina OSIS, Siswa Pengurus dan Bukan Pengurus OSIS, Komite Sekolah serta Pengawas Sekolah. Selain informan tersebut, diwawancarai

pula orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya (*snowballing process*).

Temuan Utama

Penelitian ini bertajuk “Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah”. Dalam penelitian ini terdapat empat kata kunci yang perlu didefinisikan, yakni kebijakan, kebinekaan, inklusif dan radikalisme.

Terkait dengan konsep yang dimaksud, maka kebijakan adalah regulasi-regulasi yang memengaruhi cara pandang dan pengelolaan kegiatan OSIS di sekolah. Hal ini dapat diindikasikan dengan (1) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, dan Instruksi Walikota Padang No. 451.442/Binsos-iii/2005 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Tegel/Narkoba serta Pakaian Muslim/Muslimah bagi siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; (2) Aturan-aturan hasil rapat warga sekolah seperti yang tertuang dalam Tata Tertib Sekolah; (3) Kesepakatan Bersama terkait hal insidental yang biasanya tidak tertuang dalam aturan sekolah; dan (4) Kebiasaan yang Mengikat melalui hegemoni kultur.

Sementara kebinekaan yang dimaksud adalah sebuah kondisi yang utuh dengan agama, adat istiadat, dan warisan sejarah yang plural yang diharapkan akan bertahan lama, dengan syarat harus dihormati dan tidak pernah dikhianati oleh siapapun. Hal ini terindikasi dari: (1) Rekognisi sebagai aspek tenggang rasa, di antaranya meliputi akses terhadap fasilitas tempat ibadah, praktik yang membatasi kelompok tertentu, dan pemaksaan sebuah nilai berdasarkan keyakinan tertentu; (2) Representasi sebagai aspek politik, di antaranya meliputi keterwakilan di OSIS dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan OSIS; dan (3) Redistribusi sebagai

⁶ Fathali Moghaddam, dengan menggunakan kajian psikologis, menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris. Moghaddam mengkonseptualisasi bahwa tindakan terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit. Dalam kajian MAARIF Institute, pikiran yang semakin menyempit ini dikategorikan sebagai intoleransi. Fathali Moghaddam, “The Staircase to Terrorisme”, *American Psychologist*, February-March, 2005 Vol. 60, No. 2, h. 161-169. Dalam karangannya, Jurgen Habermas menyatakan bahwa bibit-bibit intoleransi akan mengarah pada pemikiran inklusif serta akan berakhir pada gerakan radikal yang bermakna negatif, yakni melakukan tindakan dengan cara-cara destruktif pada pihak lain yang berbeda paham dan pemikiran. Jurgen Habermas, *Intolerant and Discrimination*, 2011, Sage Publication, UK.

aspek sosial-ekonomi, di antaranya meliputi akses mendapatkan dana sekolah dan akses mendapatkan beasiswa.

Sedangkan inklusif yang dimaksud adalah sifat akomodatif terhadap hal lain yang memungkinkan terbukanya pandangan dan sikap terhadap hal lain yang berbeda, dengan cara (1) memandang secara positif terhadap perbedaan dan (2) membangun kerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda demi mencapai tujuan bersama.

Adapun radikalisme yang dimaksud, mengacu kepada Martin F. Marty, sering disamakan dengan istilah fundamentalisme, yakni suatu fenomena sosial (politik, ekonomi dan keagamaan) yang bersinggungan dengan masalah-masalah ideologi atau pun tindakan yang berseberangan dengan apa yang terlihat selama ini hendak diubahnya. Hal ini diindikasikan dengan (1) menolak sistem yang sedang berlangsung, sehingga merasa perlu adanya perubahan secara mendasar; (2) tidak bersedia melakukan interpretasi atas teks keagamaan; (3) bersifat oposisional atas mereka yang memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda dengan pandangan yang dianut; dan (4) jika memungkinkan, maka perlu mengambil alih sistem ekonomi-politik dan paham keagamaan.

Konseptualisasi di sini hendak dijadikan pijakan untuk menjelaskan temuan penelitian. Adapun temuan-temuan utama yang didapat dari studi ini adalah sebagai berikut:

Kontestasi Radikalisme dan Moderatisme

Infiltrasi radikalisme di sekolah masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan (kepala) sekolah. Alumni, masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler, kurang diwaspadai karena dipandang mustahil menyebarkan pengaruh negatif. Lima dari enam SMAN dan MAN di Kota Surakarta yang menjadi sampel penelitian misalnya, dibina oleh alumni yang tergabung dalam Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri melalui aktivitas seperti *liqa* dan *halaqah*. Corak tarbiyah yang melekat pada lembaga inilah yang mendominasi paradigma

aktivis Rohis di Surakarta.⁷ Pola pembinaan serupa juga dijumpai di Kota Padang dan Kab. Sukabumi.⁸

Guru yang dipandang sebagai pemegang otoritas pengetahuan, melakukan indoktrinasi di dalam dan di luar kelas. Salah seorang Guru Bahasa Inggris di SMAN 1 Jamblang Cirebon memahami bahwa negara ini adalah *thagut*, kemudian menyampaikannya kepada para siswa di dalam kelas. Dengan pemahaman seperti itu, guru tersebut menolak membayar iuran PGRI. Bahkan yang bersangkutan pernah mengirimkannya yang non-muslim untuk mengikuti pendidikan di Pesantren Ar-Royyan karena tidak lulus mata pelajaran yang dia ampu.⁹ Sementara itu, seorang guru di MAN 2 Surakarta terbiasa mengajar sembari menyisipkan nilai anti-Syi'ah dan anti-kemajemukan.¹⁰

Kepala sekolah, karena ketidaktahuannya, seringkali mengambil kebijakan yang membuka lebar pintu sekolah bagi kelompok intoleran dan radikal untuk membina siswanya dalam hal pemahaman keagamaan. SMAN 5 Surakarta misalnya, menggandeng Pesantren Darus Syahadah, Simo, Boyolali, yang memiliki keterkaitan dengan Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo untuk melakukan pembinaan kesiswaan. Pesantren Darus Syahadah sendiri seringkali disebut sebagai Al-Mukmin yang asli karena masih memegang teguh prinsip dan ajaran Abdullah Sungkar sebagai Pendiri Yayasan Islam Al-Mukmin.¹¹

Arus radikalisme yang terjadi di sekolah mendapatkan respons dari kelompok keagamaan moderat. Salah satunya terjadi di SMAN 1 Plumbon Cirebon. Pembina Rohis

7 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kota Surakarta.

8 Ringkasan Eksekutif Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah".

9 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kabupaten Cirebon.

10 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

11 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

di sekolah tersebut didatangi oleh seorang muslimah dengan membawa setumpuk kurikulum kajian keislaman yang berisi tentang Khilafah, Khilafiyah, Negara Islam, cara bergaul dalam Islam dan bagaimana melakukan advokasi dengan menggunakan jejaring lembaga di luar sekolah. Untuk memutus benih-benih intoleransi yang bisa berujung pada aktivitas jejaring radikalisme, ia menginisiasi pembentukan Pengurus Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) hingga melibatkan Fahmina Institute dengan tujuan memberikan intervensi kepada Rohis untuk memberikan nilai-nilai keterbukaan agar lebih inklusif.¹² Namun dukungan-dukungan seperti itu banyak berubah seiring dengan pergantian kepala sekolah. Inisiatif yang dilakukan untuk menghadirkan organisasi kepemudaan di sekolah tersebut kini tidak terdengar lagi gemanya. Hal ini dikarenakan kepala sekolah tidak memahami peta gerakan radikal, dan di saat yang sama juga terjadi karena pergantian Pembina Rohis.¹³

Kuasa Negara yang Terlupakan

Penelitian ini menemukan fakta mengenai regulasi terkait OSIS yang saling tumpang tindih. Di tingkat paling atas, terdapat sejumlah regulasi yang memayungi kegiatan siswa sekolah. Misalnya, di satu sisi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sejumlah Peraturan Pemerintah (Permen) tentang Kegiatan Pembinaan Kesiswaan atau Kegiatan Ekstrakurikuler, menjadi payung hukum untuk mendorong OSIS berperan dalam pembangunan karakter siswa yang berorientasi pada persatuan, kemajuan, dan merayakan kemajemukan. Di sisi lain, karena tata kelola dan pelaksanaan pendidikan sekolah masuk dalam tanggungjawab Pemerintah Daerah, sejumlah kebijakan juga dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kegiatan terkait OSIS. Namun tidak jarang peraturan tersebut justru bertolakbelakang bahkan menghambat penerapan dan operasi kegiatan OSIS yang telah digariskan di tingkat pusat.

Tumpang tindih dan kurang jelasnya peraturan untuk memayungi kegiatan OSIS inilah yang mendorong para pemangku kebijakan di tingkat daerah, juga sekolah, mereduksi kegiatan OSIS menjadi sebatas pada penguatan aspek keagamaan semata. Akibatnya banyak kegiatan ekstrakurikuler sekolah difokuskan semata-mata pada kegiatan keagamaan. Program Pendidikan Karakter yang dicanangkan Negara sejak 2011, seringkali diterjemahkan sebatas pada praktik ritual dan pandangan satu agama tertentu secara monolitik. Hal inilah yang turut memperlemah visi dan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk di kalangan siswa, akibat dari kekeliruan memahami tugas, mandat dan fungsi OSIS.

Penerjemahan kebijakan tersebut dipandang sangat diskriminatif atau tidak relevan bagi kelompok minoritas. Bahkan tidak sesuai bila diterapkan di sebuah sekolah menengah atas negeri yang sepatutnya bisa lebih terbuka pada realitas perbedaan. Penggunaan jilbab bagi seluruh siswi di Kota Padang misalnya, meskipun awalnya tidak wajib bagi non-muslim, akan tetapi pada praktiknya terjadi pemaksaan secara tidak langsung. Hal ini karena siswi non-muslim yang bersekolah di SMA Negeri jumlahnya sedikit. Mereka terpaksa menggunakan jilbab karena merasa ada beban psikologis jika tidak menggunakannya, dan akan mudah diidentifikasi sebagai kelompok yang berbeda di tengah mayoritas muslim.¹⁴

Daya Tahan yang Rentan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran sekolah tentang peta gerakan radikalisme telah melemahkan mekanisme ketahanan warga sekolah dalam menghadapinya. Sejauh ini tidak ditemukan kebijakan khusus dari sekolah untuk memproteksi diri dari penetrasi paham dan gerakan radikal. Namun beberapa sekolah sudah menjalankan mekanisme ketahanan melalui:

12 Koidah, *Potret Toleransi Rohis, IPNU dan IPPNU*.

13 Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

14 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kota Padang.

- Sistem Filter dan Kontrol Narasumber.¹⁵ Mekanisme ini dapat dijumpai di SMAN 6 Surakarta dan beberapa SMAN di Cirebon dengan melakukan *screening* terhadap mentor atau narasumber dari luar sekolah. OSIS melacak rekam jejak dan kapasitas keilmuan narasumber, kemudian diteruskan kepada Guru Pembina hingga Kepala Sekolah, dan
- Sistem Deteksi Dini. Meskipun hanya inisiatif pribadi, seorang Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Plumbon Cirebon berupaya menyusun sistem deteksi dini dengan cara menyusun daftar perilaku-perilaku siswa yang terindikasi paham dan gerakan radikal, seperti tidak mau hormat pada bendera Merah Putih dengan dalih *thogut*.¹⁶

Internalisasi Nilai Kebinekaan

Pandangan mengenai OSIS sebagai katalisator sekolah dengan kegiatan kesiswaan mengakibatkan Pembina OSIS mendominasi usulan program. Sayangnya, transmisi dan penerjemahan nilai kebinekaan seringkali dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme atas nama keagamaan, dan hal ini didukung oleh pihak sekolah. Pandangan mengenai *liyan* atau orang lain yang berbeda agama maupun paham, pada praktiknya, seringkali membuat OSIS hanya mengakomodir pengurus dari agama, golongan, kelompok, hingga jenis kelamin tertentu yang didukung oleh pihak sekolah melalui guru. Salah dua contohnya bisa ditemui di SMAN 3 Denpasar yang enggan melibatkan siswa non-Hindu sebagai pengurus OSIS dengan dalih tugas utama OSIS adalah membantu sekolah dalam menyiapkan ritual upacara keagamaan,¹⁷ dan MAN 1 Padang yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.¹⁸ Namun yang paling menarik ditunjukkan oleh Furqon, Ketua Rohis MAN 1 Surakarta, yang mengungkapkan sikap anti-kafir (*liyan*) sebagai

sikap menjaga jarak dari orang-orang non-muslim.¹⁹

Mencari Model Ketahanan di Sekolah

Model ketahanan ini sifatnya kasuistik. Efektif di satu sekolah atau daerah, belum tentu efektif di sekolah atau daerah lain. Berikut model ketahanan sekolah yang ditemukan dari penelitian ini:

- *Screening* terhadap mentor seperti dijelaskan pada temuan “Daya Tahan yang Rentan”.
- Mendorong siswa untuk belajar dari guru, tidak dari internet. “Belajar tanpa guru atau belajar dari internet, berarti belajar dengan setan”, menjadi jargon yang didengungkan di SMAN 6 Surakarta. Hal ini sebagai respons dari banyaknya siswa yang belajar keagamaan dari internet.²⁰
- Merekatkan hubungan guru, orang tua dan siswa, dengan cara mewajibkan siswa kelas X untuk berangkat ke sekolah (SMAN 3 Surakarta) dengan diantar orang tua dalam waktu setahun. Melalui hubungan ini, sekolah berharap orang tua turut memperhatikan pendidikan dan pergaulan anaknya secara lebih seksama.²¹
- Untuk memutus ketergantungan siswa dalam mencari informasi keagamaan dari pihak luar sekolah, mendirikan Pesantren Sekolah sebagai rujukan pandangan keagamaan yang moderat ditempuh oleh MAN 3 Sukabumi (MAN Surade) dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.²²
- Mendirikan Organisasi Kepemudaan (IPNU dan IPPNU) dan Bekerjasama dengan Kelompok Moderat (Fahmina Institut) menjadi upaya yang ditempuh oleh SMAN 1 Plumbon Cirebon dalam rangka menghalau radikalisme sebagaimana dijelaskan pada temuan “Kontestasi Radikalisme dan Moderatisme”.

15 Laporan Penelitian Kota Surakarta dan Kabupaten Cirebon.

16 Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

17 Laporan Penelitian “Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah” Kota Denpasar.

18 Laporan Penelitian Kota Padang.

19 <https://conveyindonesia.com/berita-actual/2017/11/17/upaya-mengikis-intoleransi,-mempertebal-semangat-keberagaman/>. Diakses pada 29 Januari 2018.

20 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

21 Laporan Penelitian Kota Surakarta.

22 Laporan Penelitian “Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah” Kabupaten Sukabumi.

- Kunjungan atau Anjangsana ke Kelompok Agama yang Berbeda, dengan cara mengunjungi sejumlah tempat ibadah agama selain Islam dipandang sebagai satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan kebinekaan oleh Guru Sosiologi yang juga merupakan Pembina Paskibraka di SMAN 1 Jamblang Cirebon.²³
- Kunjungan ke Lokasi Bersejarah, Waruga dan Makam Pejuang Muslim Tondano, sebagai upaya memperkenalkan kearifan lokal digagas oleh Guru Sejarah di SMA Kristen 1 Tomohon. Melalui kunjungan ini, guru tersebut ingin menekankan bahwa kita semua bersaudara kendati berbeda agama dan suku.²⁴
- Karnaval Kebinekaan dengan cara mengenakan pakaian pahlawan nasional tertentu yang berasal dari agama, suku, budaya dan daerah yang berbeda menjadi salah satu kreasi OSIS di SMAN 1 Kab. Cirebon sebagai upaya mendorong kebinekaan di sekolah.²⁵
- Partisipasi Aktif Kementerian Agama Cirebon melalui kerjasama dengan sejumlah pesantren dalam rangka penguatan kapasitas tentang wawasan kebangsaan dan kebinekaan kepada guru dan siswa.²⁶
- Alokasi Dana Pendidikan untuk kesejahteraan guru dan kepala sekolah menjadi langkah yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tomohon agar dapat maksimal menumbuhkan budaya toleran dan harmoni di sekolah.²⁷
- Respons terhadap Isu-isu Aktual dengan cara menggelar seminar juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Tomohon. Salah satu isu aktual yang sempat dibahas terkait seminar Islamologi dengan menekankan ajaran Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin* sebagai respons terhadap Aksi Bela Islam di Jakarta pada penghujung 2016 lalu.²⁸

23 Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

24 Laporan Penelitian "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" Kota Tomohon.

25 Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

26 Laporan Penelitian Kabupaten Cirebon.

27 Laporan Penelitian Kota Tomohon.

28 Laporan Penelitian Kota Tomohon.

Rekomendasi

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sekolah rentan disusupi paham dan gerakan radikal karena belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk memproteksi sekolah dari penetrasi paham dan gerakan radikalisme. Meskipun demikian, beberapa sekolah sudah menjalankan mekanisme ketahanan melalui sistem filter dan kontrol narasumber dan sistem deteksi dini meskipun inisiatif pribadi seorang guru.

Masuknya radikalisme ke sekolah melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan (kepala) sekolah. Penyusupan paham ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sekolah tentang peta gerakan radikalisme. Dan hanya sedikit sekolah yang merespons ketika infiltrasi terjadi, seperti yang dilakukan oleh Pembina Rohis SMAN 1 Plumbon Cirebon. Akan tetapi dari hasil penelitian ini juga terdapat beberapa model ketahanan sekolah yang sifatnya kasuistik. Efektif di satu sekolah atau daerah, belum tentu efektif di sekolah atau daerah lain. Namun tidak menutup kemungkinan untuk direplikasi di sekolah atau daerah lain.

Berdasarkan temuan penelitian, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- Kemendikbud dan Kemenag perlu membuat regulasi yang dapat mengakomodasi keterlibatan kelompok masyarakat sipil moderat yang terbukti mampu melakukan pembinaan dan pendampingan dalam memperkuat toleransi, inklusivitas dan kebinekaan. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag dan Sekolah perlu selektif dalam mengundang mau pun menerima kelompok yang hendak melakukan pembinaan kesiswaan di sekolah, seperti yang terjadi di Kab. Cirebon.
- Kemendikbud dan Kemenag serta pemangku kebijakan di tingkat lokal (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag) perlu merumuskan ulang dan mendiseminasikan berbagai regulasi terkait OSIS dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah.

- Kemendikbud dan Kemenag serta pemangku kebijakan di tingkat lokal (Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag dan Sekolah) harus merumuskan *Standar Operational Procedure* (SOP) terkait Sistem Deteksi Dini, Mekanisme Pengaduan dan Mekanisme Penanganan terkait radikalisme di sekolah serta standardisasi mentor dalam kegiatan OSIS.
- Perlu dilakukan kerjasama antara sekolah, orang tua dan siswa untuk melakukan pertemuan dan pergaulan lintas suku, agama, ras dan budaya dalam bentuk kegiatan OSIS seperti dialog antar sekolah yang beragam dari sisi agama, suku dan budaya.
- Sekolah harus memperkuat kebinekaan dan ideologi kebangsaan melalui model ketahanan sekolah yang beberapa di antaranya ditemukan dalam penelitian ini, seperti Anjangsana ke kelompok agama, suku maupun etnis yang berbeda.



**Enhancing the Role of Religious Education in
Countering Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.